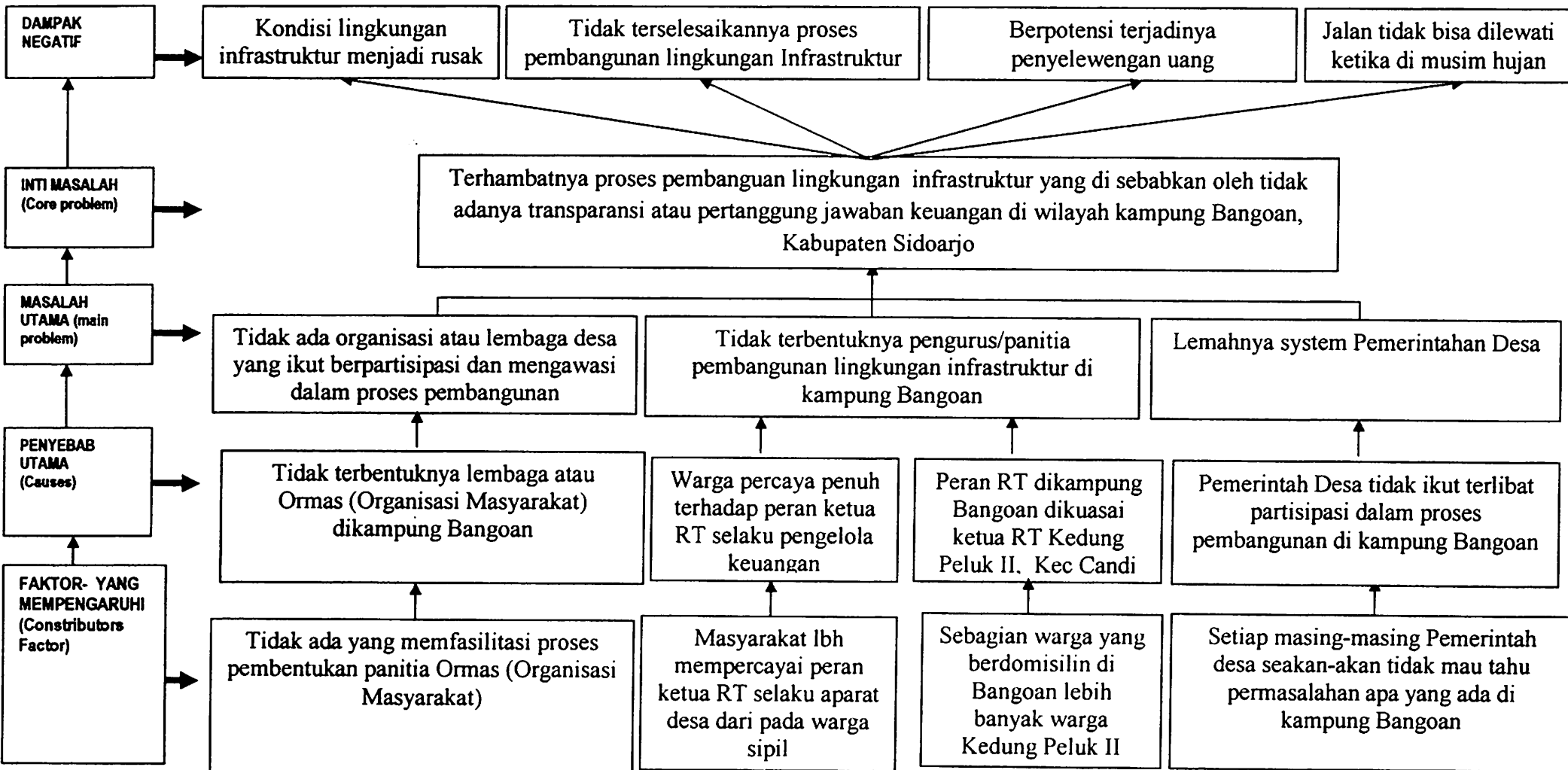
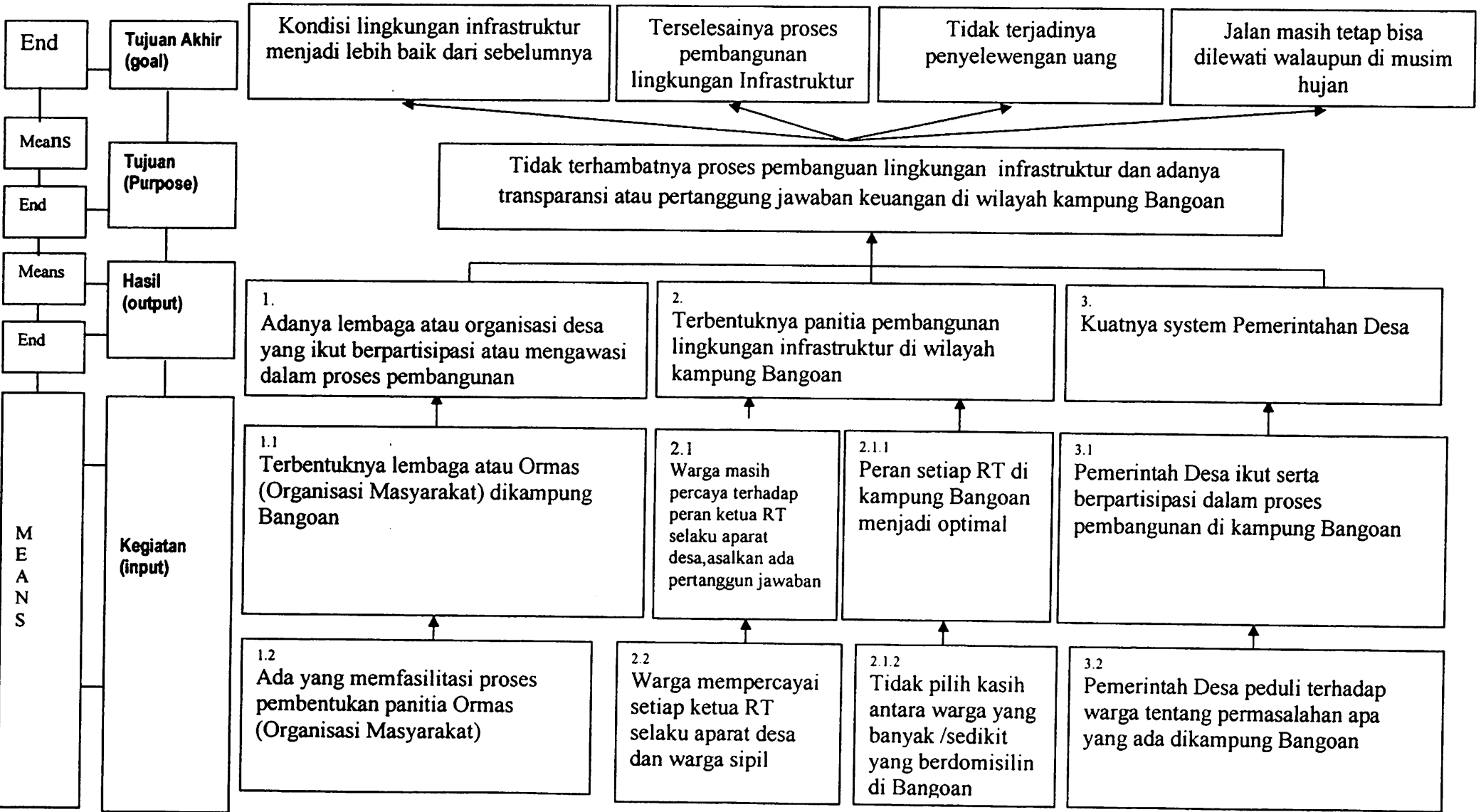


Hirarchi Analisa Pohon Masalah



Hirarchi Analisa Harapan/Tujuan



MATRIK PERENCANAAN OPERASIONAL (MPO) ATAU MATRIK RENCANA KERJA (MRK)

Hasil 1 :

No. Keg	Kegiatan dan Sub-kegiatan	Target	Jadwal Pelaksanaan												Penanggung Jawab	Support Sumber Daya Yang diperlukan			Resiko/ Asumsi		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Personel	Material/ Peralatan	Beaya			
1.1.	Pavingisasi	Terselesainya proses pembangunan lingkungan infrastruktur pavingisasi	o	o													- Panitia Pembangunan - Lembaga Desa atau Organisasi Masyarakat (ORNOP)	2 Person (Tukang) 4 Person (Pekerja) Dan Swadaya Masyarakat Bangoan (Gotong Royong)	- Pasir Pasang - Benang - Selang - Ember - Sertu - Paving - Semen - Bata Merah - Tukang - Pekerja	Rp 35.477.500.00	Tidak terselesaikan nya program pavingisasi

MATRIK ANALISA PARTISIPASI (MAP)

1	2	3	4	5	6
Organisasi/kelompok	Karakteristik	Kepentingan Utama	Sumber Daya Yang Dimiliki	Sumber Daya Yang Dibutuhkan	Tindakan Yang Harus dilakukan
Lembaga/Organisasi Formal dan Non Formal	Formal : - Karang Taruna Bangoan Sejati Non Formal : - Takmir Mushola/Masjid - Pengurus TPA	Mengadakan perbaikan jalan melalui program Pavingisasi dan pembuatan Saluran Air	Adanya Swadaya Masyarakat (Gotong Royong) terhadap warga kampung Bangoan	Selain adanya swadaya masyarakat juga di butuhkan penambahan modal untuk program tersebut	Penanggulangan program secara intensif dan harus dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan demi kesejahteraan bersama.

Keterangan:

- 1 Lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok yang secara langsung akan terlibat dalam pelaksanaan program.
- 2 Penjelasan tentang Lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok tsb. Spt. Pemerintah, non pemerintah atau swasta, level atau scope, pengaruhnya, fokus/bidang, dll.
- 3 Kepentingan Lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok terhadap program yang akan dilaksanakan baik yang tersembunyi maupun yang tampak.
- 4 Sumber daya yang dimiliki Lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok yang mungkin dapat dikontribusikan pada pelaksanaan program.
- 5 Sumber Daya yang dibutuhkan Lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok agar dapat secara efektif terlibat dalam pelaksanaan program.
- 6 Rekomendasi/kesimpulan apakah yang harus dilakukan oleh pelaksana program terhadap Lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok tersebut.

Setelah melakukan riset pendahuluan analisis masalah dan analisis tujuan, peneliti menyimpulkan bahwa permasalahan yang ada dikampung Bangoan menyangkut tentang kinerja dari pada pemerintah desa, permasalahan inti yang menyangkut tentang sektor pembangunan lingkungan (infrastruktur) adalah terhambatnya pembangunan lingkungan infrastruktur yang di sebabkan oleh tidak adanya transparansi atau pertanggung jawaban keuangan di wilayah kampung Bangoan Kabupaten Sidoarjo, akibat yang ditimbulkannya adalah kondisi lingkungan infrastruktur menjadi rusak, tidak terselesaikannya proses pembangunan lingkungan Infrastruktur, berpotensi terjadinya penyelewengan uang, jalan tidak bisa dilewati ketika di musim hujan, sehingga pendapatan warga menjadi berkurang akibat dari terhambatnya pembangunan lingkungan infrastruktur yang kurang bisa optimal dalam melakukan proses pembangunan lingkungan.

Masalah utama yang menyebabkan terhambatnya proses pembangunan lingkungan infrastruktur yang di sebabkan oleh tidak adanya transparansi atau pertanggung jawaban keuangan di wilayah kampung Bangoan, Kabupaten Sidoarjo, antara lain: Pertama tidak ada lembaga atau organisasi desa yang ikut berpartisipasi atau mengawasi dalam proses pembangunan, karena warga Bangoan sendiri tidak mempunyai akses komunikasi terhadap pemerintah desa setempat, sehingga warga lebih percaya kepada peran ketua RT Kedung Peluk selaku aparat desa di kampung Bangoan, sehingga tidak terbentuknya lembaga atau Ormas (Organisasi Masyarakat) di kampung Bangoan yang mengawasi memonitoring dalam proses pembangunan, di samping itu juga tidak ada yang memfasilitasi proses pembentukan panitia pembangunan, selain itu secara individual warga sendiri kurang mempunyai kesadaran untuk merubah pola hidup mereka melalui dari aspek

Dari beberapa penyebab masalah utama berdampak pada tidak adanya transparansi dana yang dipegang oleh ketua RT setempat selaku pengelola keuangan, sehingga pembangunan lingkungan jalan (infrastruktur) yang ada dikampung Bangoan menjadi tidak bisa optimal didalam upaya melakukan pembangunan lingkungan, karena ada salah satu oknum pemerintah desa yang tidak bisa transparan dalam mengelolah keuangan yang diperuntukan untuk pembangunan lingkungan infrastruktur di kampung Bangoan, pada awalnya warga percaya ketika uang hasil sumbangan dari donatur untuk perbaikan jalan dipegang oleh ketua RT, akan tetapi dari kepercayaan yang sudah diberikan oleh warga terhadap ketua RT, sehingga berpotensi penyelewengan uang oleh ketua RT yang selaku mengelolah uang. Selain itu dampak dari masalah utama selanjutnya yaitu tidak terselesaikannya proses pembangunan lingkungan Infrastruktur sehingga kondisi lingkungan infrastruktur di kampung Bangoan dan jalan tidak bisa dilewati ketika di musim hujan. Dari permasalahan yang ada di kampung Bangoan tersebut tidak bisa berjalan secara optimal apa yang sudah diharapkan oleh warga sebelumnya.

Dari beberapa penyebab utama dari masalah utama diatas adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan stakeholder yang ada disekitar kampung Bangoan, dan warga juga tidak tahu harus berbuat apa supaya pembangunan lingkungan yang ada bisa berjalan dengan optimal tanpa ada hambatan suatu apapun, penyebab utama yang lain juga menyangkut sistem pemerintah desa yang kurang memihak terhadap warga kampung Bangoan karena setiap kelurahan/desa seakan-akan tidak mau tahu permasalahan apa yang ada dikampung Bangoan sehingga warga tidak mendapatkan perhatian penuh disetiap

kelurahan /desanya masing-masing, khususnya dikelurahan/desa kedung peluk yang terjadinya tindak pidana korupsi terhadap kepala desa kedung peluk yang tersangkut melakukan tindak pidana korupsi atau penggelapan uang hasil pipa proyek dari LAPINDO untuk kesejahteraan desa, selain itu juga penyebab utama yang lain adalah menyangkut kepercayaan kepada ketua RT yang selama ini masyarakat sudah percaya penuh kepada ketua RT yang selaku mengelolah/memegang dan mengatur keluar masuk keuangan, akan tetapi dari kepercayaan tersebut ternyata di manfaatkan oleh ketua RT Kedung Peluk di kampung Bangoan sehingga terjadinya penyelewengan uang.

Faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi permasalahan diatas antara lain; Pertama, kurangnya pendidikan kesadaran kritis tentang pentingnya pembangunan lingkungan yang sehat sehingga warga tidak begitu menghiraukan tentang bahayanya lingkungan yang kotor, faktor lain yang mempengaruhi permasalahan utama, yaitu warga juga tidak mengetahui cara pembuatan proposal untuk keberlangsungan pembangunan lingkungan dibidang infrastruktur.jalan dikampung Bangoan. Kedua, Kepala desa juga tidak ada tindakan sama sekali untuk mencari solusi atau jalan keluar demi kesejahteraan warga dikampung Bangoan, karena pemerintah desa tersebut kurang melakukan pengembangan disektor lingkungan yang strategis yang sesuai dengan kondisi lokal diartikan sebagai pembangunan lingkungan secara berkelanjutan sebagai upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan kualitas lingkungan sebagai tempat hidup dan bekerja semua orang khususnya warga diperkampungan Bangoan. Ketiga, kepala desa kedung peluk meninggalkan desa sebelum masa jabatannya habis, karena kepala desa terbelit oleh kasus penggelapan dana hasil dari

lingkungan Infrastruktur, tidak terjadinya penyelewengan uang, dan jalan masih tetap bisa dilewati ketika di musim hujan, sehingga warga masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari walaupun dalam keadaan hujan. Untuk hasil (Result/out put)-nya dari permasalahan utama antara lain, Adanya lembaga atau organisasi desa yang ikut berpartisipasi dan mengawasi dalam proses pembangunan, dan terbentuknya panitia pembangunan lingkungan infrastruktur di wilayah kampung Bangoan oleh warga sendiri, dan adanya dukungan moral oleh pemerintah setempat sehingga terjadinya kuatnya system Pemerintahan desa.

Kegiatan (Input) selanjutnya Terbentuknya lembaga atau Ormas (Organisasi Masyarakat) dikampung Bangoan, dan ada yang memfasilitasi selama proses pembentukan panitia Ormas (Organisasi Masyarakat), peran ketua RT masih di percaya oleh warga selaku aparat desa, asalkan ada transparansi dan pertanggung jawaban, selain itu di upayakan warga juga mempercayai setiap ketua RT selaku aparat desa dan warga sipil dalam mengelola keuangan, dan peran di setiap RT di kampung Bangoan menjadi optimal, tidak pilih kasih antara warga yang banyak penduduknya ataupun/sedikit yang berdomisilin di kampung Bangoan. Pemerintah desa juga ikut terlibat serta berpartisipasi dalam proses pembangunan di kampung Bangoan, dan di harapkan setiap Pemerintah desa peduli akan permasalahan apa yang ada dikampung Bangoan. Dan seterusnya dilakukan sampai berhasil dan masyarakat berdaya dan tidak tergantung oleh pihak manapun untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Untuk lebih jelasnya, maka peneliti akan sajikan tujuan proses pendampingan'

2	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya hak-hak dan kewajiban sebagai makhluk sosial dalam mencapai kesejahteraan - Adanya Program KAT (<i>Komunitas Adat Tertinggal</i>) di kampung Bangoan - Warga di libatkankan dalam menentukan program-program desa (RPJM) 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan analisis persoalan, merancang program aksi bersama warga kampung Bangoan dan melibatkan stakeholders- stakeholders setempat
3	Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan kesadaran budaya masyarakat untuk saling menghormati dan memenuhi kebutuhan sebagai makhluk sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan diskusi-diskusi kelompok belajar masyarakat, dan melakukan pendekatan dengan tokoh agama dan masyarakat
4	Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah mendukung sepenuhnya dalam kebijakan publik yang pro pada pelaksanaan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendekatan dan kerja sama kelembagaan dengan aparat pemerintah terkait, dialog dan lobi-lobi dengan aparat pemerintah terkait, dan melibatkan partisipasi warga Bangoan dalam proses pembuatan keputusan dalam konteks yang memungkinkan secara institusional
5	Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Kuatnya system penegakan UU dalam pengetasan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kerja sama dengan aparat-aparat penegak hukum dan melakukan koordinasi untuk menyamakan persepsi tentang penanganan pengetasan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal

Mustajabah kampung Bangoan sendiri. Dipilih di Mushola karena sebagai tempat untuk diskusi dan karena itu merupakan fasilitas umum untuk seluruh warga Bangoan. Selain itu, rumah warga tidak ada yang cukup luas untuk menampung kumpulan semua warga.

Diskusi pada malam hari ini sudah menjurus ke permasalahan inti. Meskipun banyak masalah di kampung ini, warga meminta masalah perbaikan jalan (*Infrastruktur*) di dahulukan karena menurut warga sangat penting. Diskusi dimulai pada jam 18.30 wib, tetapi di dalam undangan sudah tertera pada jam 18.00 wib diskusi akan segera dimulai, akan tetapi pada kenyataannya warga Bangoan yang hadir kebanyakan datang pada jam 18.30 wib, bahkan ada juga yang baru datang sekitar jam 19.00 wib, yang datang pada malam hari itu untuk menghadiri diskusi di mushola kurang lebih sekitar 15 orang warga Bangoan termasuk ketua RT di setiap-setiap desa, Banjarpanji, Kedung Peluk, dan Plumbon. Pertemuan dan diskusi bersama warga tersebut berakhir jam 20.30 wib, untuk sebagian warga di persilakan pulang pada jam tersebut (*20.30 wib*), dengan banyak pertimbangan. Satu jam selanjutnya di teruskan dengan beberapa pemuka masyarakat dan para pemuda yang ada di kampung Bangoan.

Perjalanan diskusi tentang pembuatan proposal dan masalah perbaikan jalan (*Infrastruktur*) pertama kali di mulai dari pengenalan bantuan apa saja yang nantinya akan menjadi kebutuhan material untuk perbaikan jalan tersebut, dalam diskusi tersebut juga membahas satuan volume luas dan panjang jalan, selain itu ketinggian dan kedalaman yang nantinya akan di perkerjakan, selajutnya di samping itu juga membicarakan tentang prakiraan sampai menghabiskan dana berapa untuk perbaikan jalan di kampung Bangoan dan material apa saja yang akan di butuhkan. Dari hasil pertemuan atau diskusi pada malam hari itu muncul

satu warga tentang kelanjutan usaha ini, ketua RT Banjarpanji dan tokoh masyarakat memberi saran yang menurut warga tidak terlalu sulit tetapi lumayan beresiko, karena upaya yang pernah di lakukan warga meminta bantuan kepada pengguna jalan sebelumnya ternyata tidak sesuai harapan para pengguna jalan terhadap warga kampung Bangoan, sehingga kepercayaan yang muncul terhadap pengguna jalan kepada warga Bangoan sudah tidak ada lagi. Dari kesalahan tersebut warga mencoba bangkit dari keterpurukan untuk memahami suatu kesalahan yang pernah di lakukan salah satu oknum pemerintah desa di kampung Bangoan. Misi warga selanjutnya adalah belajar dari dari suatu kesalahan dengan cara mengembalikan kembali kepercayaan para stakeholders-stakeholders yang selama ini sudah pernah membantu financial kepada warga di kampung Bangoan. Yaitu dengan cara melakukan upaya apa yang sudah pernah di lakukan oleh warga sebelumnya dengan meminta sumbangan kepada para pengguna jalan di setiap harinya.

Ada beberapa usulan mengenai penyebaran proposal ke beberapa tempat antara lain, ke pemilik tambak yang di sekitar permukiman kampung Bangoan, salah satunya tambak milik Bupati sekarang kaji Saiful (Saifulillah), yang dulunya menjabat sebagai Wakil Bupati sekarang beralih profesi menjadi Bupati Kabupaten Sidoarjo 2010-2015. Penyebaran proposal selain ke para pemilik tambak juga di lakukan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang sekiranya mempunyai harta lebih untuk di sumbangkan kepada warga kampung Bangoan untuk pembangunan perbaikan jalan (*Infrastruktur*), selain itu rencana penyebaran proposal juga di lakukan di pabrik-pabrik atau perusahaan yang ada di wilayah administrasi dari ke tiga desa dan tiga Kecamatan.

Karena sejauh ini selama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (*PNPM*) yang turun di setiap desa, warga kampung Bangoan tidak pernah di libatkan dalam merumuskan Program Jangka Menengah (*PJM*) LKM yang sudah terbentuk. Dalam hal ini warga kampung Bangoan mempunyai peluang untuk memasukan kegiatan atau usulan warga Bangoan kegiatan pavingisasi sebagai Program Jangka Menengah (*PJM*) LKM di setiap desa, yang bertujuan agar kampung Bangoan tersentuh oleh adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (*PNPM*), karena program tersebut terbagi menjadi tiga kategori atau tiga program. Antara lain, lingkungan, sosial dan ekonomi.

Dari bantuan *PNPM* yang diterima setiap desa, mendapatkan bantuan anggaran sebesar 200 juta dalam jangka selama tiga tahun. Dari anggaran yang disebutkan bahwasannya anggaran tersebut di bagi dari tiga program kegiatan yaitu, program lingkungan mendapatkan anggaran sebesar 70% dari anggaran 200 juta, untuk program sosial mendapatkan anggaran sebesar 10%, dan yang terakhir program ekonomi mendapatkan anggaran sebesar 20%. Dari setiap program yang telah disebutkan ternyata anggaran yang paling besar adalah anggaran program lingkungan. Sehingga dari anggaran *PNPM* (*Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat*) yang sudah ada, peneliti beserta warga kampung Bangoan meneruskan niat untuk mencari solusi yang terbaik, solusi tersebut adalah menghubungi setiap LKM (*Lembaga Swadaya Masyarakat*) dari ketiga desa. Supaya dalam hal ini program atau kegiatan yang diusulkan warga kampung Bangoan berupa pavingisasi jalan diperkampungan mereka supaya kondisinya lebih baik lagi cepat terealisasi dan terselesaikannya proses pembangunan tanpa harus adanya suatu permasalahan baru. Paling tidak kegiatan atau program tersebut

warga dan melihat kondisi biaya pavingisasi terlalu menghabiskan banyak biaya, sehingga uang hasil dari sumbangan tersebut di masukan ke dalam salah satu bank swasta untuk menjaga lebih aman lagi. Dana yang sebesar itu dipegang atau di atas namakan ketua ta'mir masjid yang rencananya akan digunakan untuk perbaikan jalan pavingisasi ke depan.

Selain itu juga ada salah seorang pemilik tambak yang juga menawari uruk-uruk dari serpihan atau puing-puing rumah yang kena dampak dari lumpur lapindo, beliau yang bernama H. Mahfud 50 tahun, dan beliau juga mempunyai peran penting di dalam bencana lumpur lapindo tersebut, tapi bantuan tersebut dengan syarat harus mengambil sendiri serpihan atau puing-puing rumah yang sudah hancur yang ada di sekitar lumpur lapindo. Pada akhirnya bantuan tersebut oleh warga untuk dijadikan bahan dasar rabat jalan supaya tidak terlalu menghabiskan banyak serti ketika nanti dalam proses pembangunan berlangsung dan bantuan tersebut akhirnya di terima oleh warga dengan sangat senang hati karena bantuan tersebut tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya. Untuk lebih jelasnya mengenai lampiran proposal dapat di lihat sebagaimana *terlampir*.